

 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	NOMOR SOP	W.25.SDM.SDM.1.OT.02.02-783
	TANGGAL PEMBUATAN	29 September 2023
	TANGGAL REVISI	29 September 2023
	TANGGAL EFEKTIF	29 September 2023
	DISAHKAN OLEH 	KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA  Ditandatangani secara elektronik oleh : Wahju Prihandono NIP 197210081999031001
SUB BAGIAN TATA USAHA	NAMA SOP	PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Kementerian Hukum dan HAM 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM; 6. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. 2. Memahami tata cara dan peraturan penatausahaan, pembukuan, pertanggungjawaban, dan pelaporan anggaran.	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
-	Komputer, Laptop, Jaringan Internet	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, proses pencairan tunjangan kinerja menjadi terhambat.	Disimpan sebagai arsip	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		JF / PPABP	Bendahara	Kepala Subbagian TU/PPSPM	Kepala Badiklat / PPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Template dan Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai	Mulai				Daftar rekapitulasi pegawai	30 menit	Daftar rekapitulasi pegawai	
2	Memeriksa dan mengoreksi daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja					Daftar rekapitulasi pegawai	30 menit	Daftar rekapitulasi pegawai	
3	Memeriksa dan mengoreksi daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja					Daftar rekapitulasi pegawai	30 menit	Daftar rekapitulasi pegawai	
4	Membuat SPTJM					Konsep surat	30 menit	SPTJM	
5	Mendownload Data Tunjangan Kinerja di Aplikasi SIMPEG Kementerian Hukum dan HAM					Data Tunjangan Kinerja Pegawai	30 menit	Data Tunjangan Kinerja Pegawai	
6	Mengirimkan surat usulan dan data pembayaran tunjangan kinerja pegawai ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara	Selesai				Surat usulan tunjangan dan data rekapitulasi pegawai	30 menit	Tunjangan Kinerja	

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi
Utara,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Wahju Prihandono
NIP 197210081999031001